

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh Instansi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan media dalam mempertanggung-jawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pertanggung-jawaban dimaksud berupa laporan yang menggambarkan Kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang

bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2016 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian

indikator kinerja, dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Prabumulih yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas kepada Walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2016. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.2. TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih, berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Prabumulih melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam mengendalikan kebijakan teknis dalam melaksanakan kewenangannya di bidang Pekerjaan Umum.

1. Dalam menjalankan Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas :
 - a. Mengemban Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih
 - b. Membantu Walikota Prabumulih dalam mengendalikan kebijakan teknis dalam melaksanakan kewenangannya di bidang Pekerjaan Umum.
 - c. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf dalam unit kerjanya.

- d. Mengendalikan pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan baik peralatan maupun kegiatan pembangunan bidang Pekerjaan Umum.
 - e. Memberi masukan, usul dan saran serta pelaporan dibidang Teknis operasional kepada Walikota Prabumulih.
 - f. Menjalin koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan.
1. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Point 1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan pembinaan, pemberian bimbingan dan perizinan bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Prabumulih.
 - b. Pengawasan dan pengendalian teknis sesuai dengan Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Prabumulih.
 - c. Pengelolaan manajemen Dinas Pekerjaan Umum.
 - d. Mengendalikan/pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan di bidang Pekerjaan Umum.

B. Struktur Organisasi

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dalam Wilayah Kota Prabumulih. Dinas Pekerjaan Umum Mempunyai 4 (empat) bidang dan 1 (satu) Sekretariat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas di bidang binamarga, sumber daya air, air limbah, drainase, permukiman, dan perumahan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijaksanaan Teknis Pembangunan, pengelolaan, pemberian bimbingan dan perizinan bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Prabumulih.
- b. Pengawasan dan pengendalian secara teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Prabumulih.
- c. Pengelolaan manajemen Dinas Pekerjaan Umum.
- d. Pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan dibidang Pekerjaan Umum.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan;
Mempunyai tugas pokok sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan dengan Kepala-Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.
- b. Pemberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas.

- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan atau berada diluar daerah berdasarkan Surat Penunjukkan Mewakili.
- d. Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- e. Penandatanganan administrasi dibidang umum, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan pelimpahan dari Kepala Dinas.
- f. Pengawasan ke dalam yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan pembagian tugas dan petunjuk kepada staf agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Bidang Bina Marga

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup kebinamargaan. Bidang Bina Marga, membawahi :

- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Bina Marga yang berkenaan dengan pembangunan dan peningkatan jalan kota serta pembangunan dan penggantian jembatan.
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Bina Marga yang berkenaan dengan pemeliharaan serta perbaikan jalan kota dan jembatan.
- c. Seksi Tata Tehnis dan Peralatan Bidang Bina Marga;

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Bina Marga yang berkenaan dengan masalah teknis dan peralatan Bidang Bina Marga

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pelaksanaan peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan.
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- c. Pengelolaan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam.
- d. Pengoperasian, penyimpanan, perawatan, pemanfaatan, pemeliharaan, penyewaan, inventarisasi dan mengurus administrasi alat-alat berat.
- e. Perumusan sasaran dalam pelaksanaan tugas pembangunan dibidang kebinamargaan.
- f. Pemantauan pelaksanaan pembangunan dibidang kebinamargaan.
- g. Pembuatan laporan kegiatan pembangunan fisik dan keuangan setiap akhir bulan.
- h. Penjalin koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan.
- i. Pembimbing dan pengarah staf dalam sub unit kerja untuk melaksanakan tugas yang diembannya.
- j. Pemberi masukan, usul dan saran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih.

4. Kepala Bidang Cipta Karya dan Pengairan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup, tata ruang dan bangunan, permukiman dan perumahan, sebagian tugas Bidang Sumber

Daya Air yang berkenaan pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah serta pembangunan dan pembinaan prasarana dan sarana air bersih non komersial. Bidang cipta karya membawahi :

a. Seksi Tata Ruang dan Bangunan

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Cipta Karya yang berkaitan dengan tata ruang dan bangunan.

b. Seksi Perumahan dan Pemukiman

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Permukiman Dan Perumahan yang berkenaan dengan pembangunan, pengembangan, peremajaan dan perbaikan permukiman dan perumahan beserta prasarana, sarana dan fasilitas lingkungannya.

c. Seksi Tata Tehnis dan Peralatan Bidang Cipta Karya;

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Cipta Karya yang berkenaan dengan masalah teknis dan peralatan Bidang Cipta Karya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Bidang Cipta Karya dan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pembangunan, perintisan, perbaikan, peremajaan perumahan, pengairan, dan fasilitas lingkungannya.
- b. Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan perumahan, gedung dan pengairan.
- c. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan, gedung, dan pengairan.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Pemberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas.

- f. Pelaksanaan pembagian tugas dan petunjuk kepada staf agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas.
- h. Penilaian terhadap prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karier.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

5. Kepala Bidang Program

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup survey dan pengukuran, perencanaan umum dan perencanaan teknis. Bidang Program membawahi :

a. Kepala Seksi Survey dan Pengukuran

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Program yang berkenaan dengan survey dan pengukuran.

b. Kepala Seksi Perencanaan Umum

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Program yang berkenaan dengan Perencanaan Umum

c. Kepala Seksi Perencanaan Teknis

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Program yang berkenaan dengan Perencanaan teknis.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Bidang Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pekerjaan Umum.
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan teknik, dan survey dibidang Pekerjaan Umum.
- c. Penyiapan bahan pengumpulan data, penelitian, study kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan.

- d. Pelaksanaan survey dan pemetaan serta penyelenggaraan pengujian dan pengendalian mutu tanah, aspal, beton, air, dan bahan bangunan lainnya.
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dibidang Pekerjaan Umum.
- f. Penyiapan bahan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- g. Pemberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan pembagian tugas dan petunjuk kepada staf agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
- i. Penilaian terhadap prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karier.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kepala Bidang Tata Kota

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Tata Kota. Bidang Tata Kota membawahi :

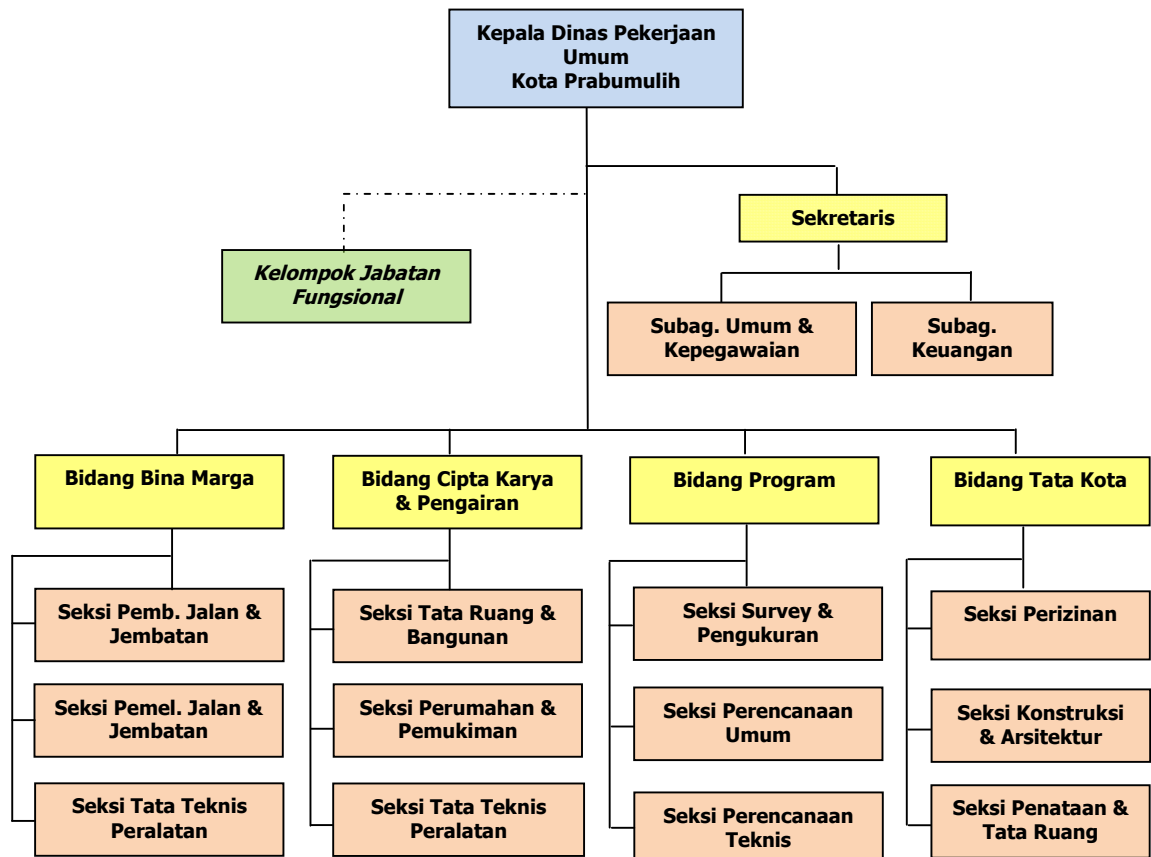
- a. Kepala Seksi Perizinan
Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Tata kota yang berkaitan dengan perizinan.
- b. Kepala Seksi Konstruksi dan Arsitektur
Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Tata kota yang berkaitan dengan konstruksi dan arsitektur
- c. Kepala Seksi Penataan dan Tata Ruang
Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Penataan dan Tata Ruang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Bidang Tata Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Tata Kota.
- b. Penyelenggaraan dan memproses permohonan Izin Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penerusan kebijakan operasional/pembangunan kota dibidang Tata Kota.
- d. Pelaksanaan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari Swasta.
- e. Pengadaan komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Pemberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih



1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

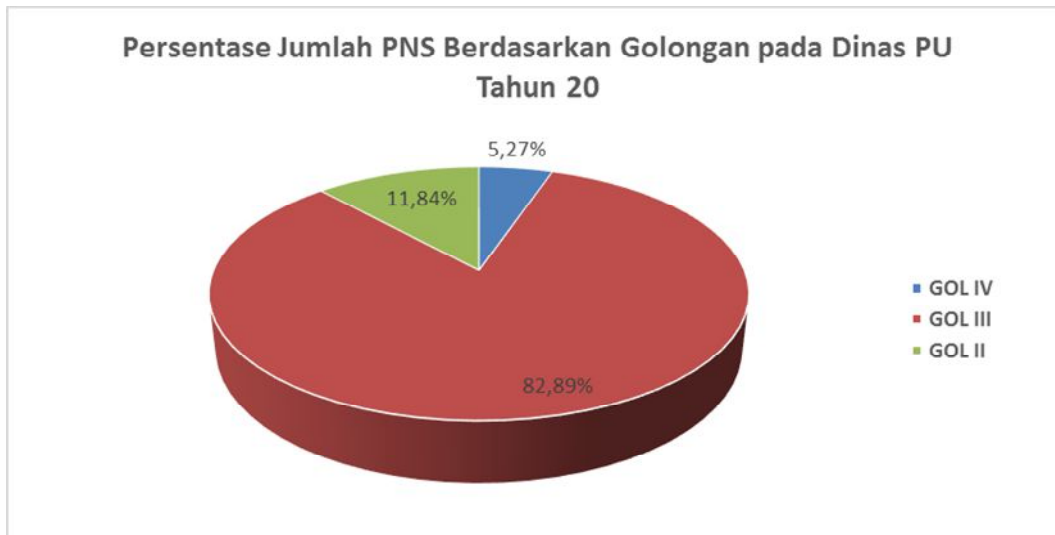
1) Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih
Berdasarkan Golongan Tahun 2016

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	I	-
2.	II	9
3.	III	63
4.	IV	4
Jumlah		76

Sumber : Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum 2016

Gambar 1.2
Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
pada Dinas PU Tahun 2016



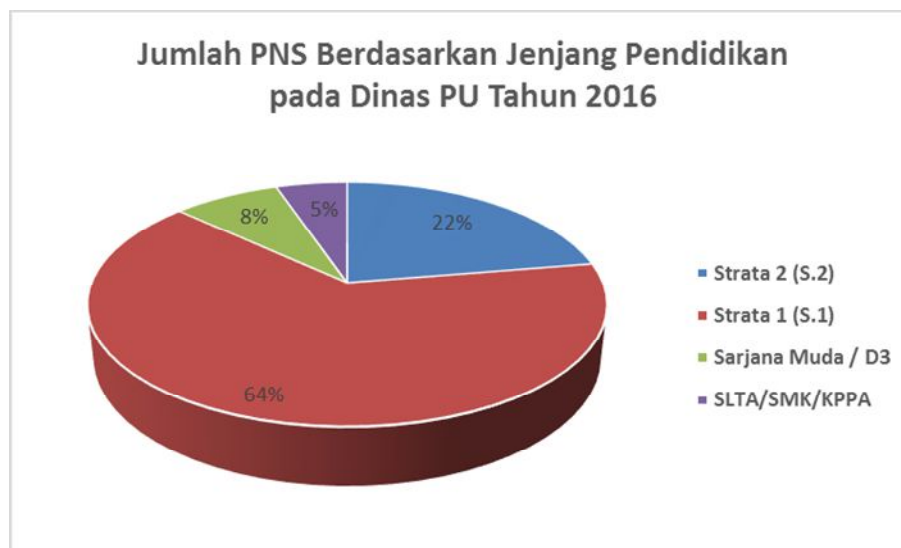
2) Berdasarkan Pendidikan

Tabel. 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Orang
1.	Strata 2 (S.2)	11	6	17
2.	Strata 1 (S.1)	35	14	49
3.	Sarjana Muda / D3	5	1	6
4.	SLTA/SMK/KPPA	4	-	4
Jumlah				76

Sumber : Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum 2016

Gambar 1.3
Persentase Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016



3) Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

Tabel. 1.3

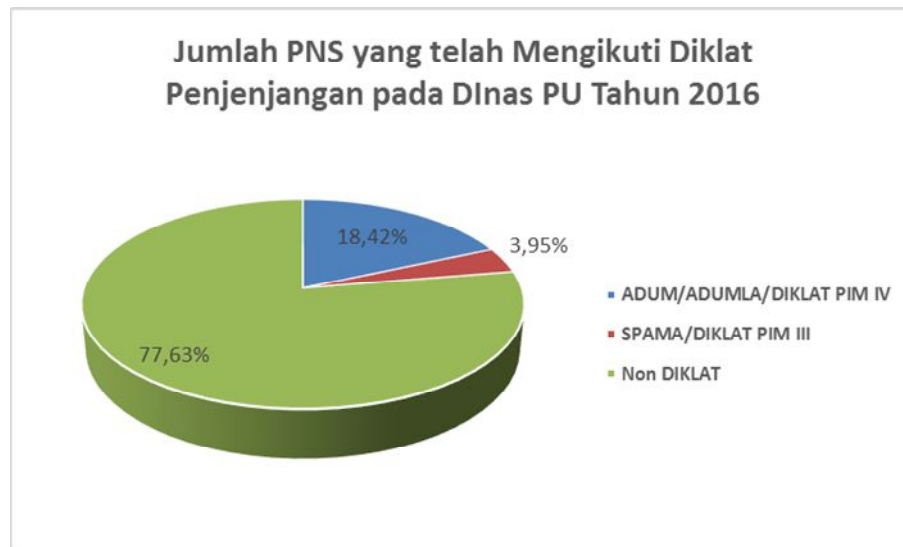
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih
Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tahun 2016

No	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLAT PIM IV	14
2.	SPAMA/DIKLAT PIM III	3
3.	SPAMEN/DIKLAT PIM TK.I	-
Jumlah		17

Sumber : Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum 2016

Gambar 1.4

Persentase Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih
Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tahun 2016



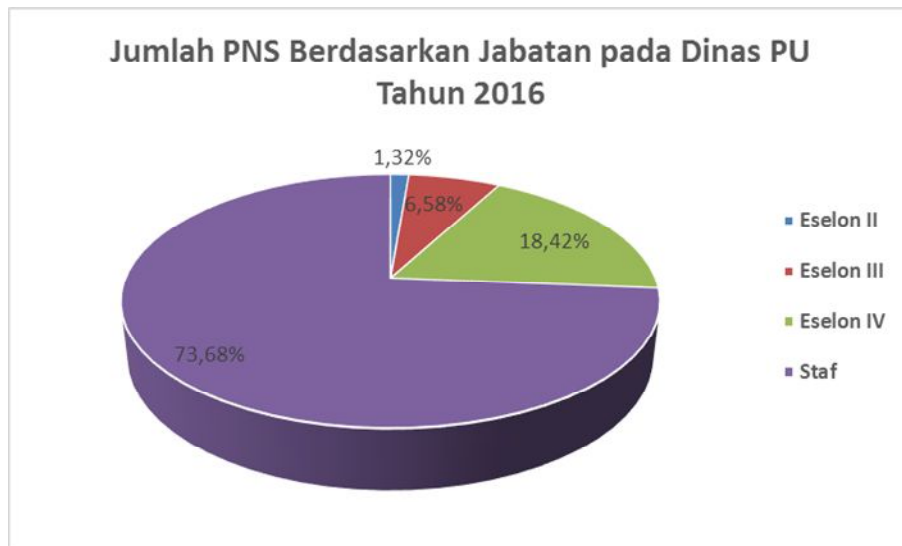
4) Berdasarkan Eselon

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih
Yang Menduduki Eselon dan Staf Tahun 2016

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	14
4.	Fungsional	-
5.	Staf	56
Jumlah		76

Sumber : Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum 2016

Gambar 1.5
Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan
Pada Dinas PU Tahun 2016



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Iktisar Eksekutif

- Bab I** : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi, Isu Strategis, serta Sistematika Pelaporan LAKIP.
- Bab II** : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang Renstra 2013-2018, visi dan misi, tujuan sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program, Rencana Kinerja tahun 2016, Penetapan Kinerja Tahun 2016.
- Bab III** : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran Kinerja Tahun 2016, Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi sebelumnya.
- Bab IV** : Penutup, menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016, Permasalahan yang dihadapi, pemecahan masalah.

Lampiran-Lampiran :

- Lampiran 1. Formulir Rencana Kinerja Tahunan
- Lampiran 2. Formulir Penetapan Kinerja
- Lampiran 3. Formulir Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Pernyataan Visi

Perencanaan strategis merupakan tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi. Semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018.

Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih adalah :

**“ Mewujudkan Institusi Pekerjaan Umum yang Handal,
Akuntabel, Kreatif dan Partisipatif untuk Menghasilkan
Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas ”**

2.1.2. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana kebinamargaan.
3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pemantapan data base dan pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan yang terpadu.
4. Meningkatkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan peningkatan pelayanan administrasi.
5. Mengembangkan sistem penataan ruang kota

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.2.1. Tujuan

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih. Dengan dinyatakannya tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih, maka akan diketahui apa yang seharusnya dilaksanakan dalam kurun waktu dimaksud dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Lebih jauh penentuan tujuan/strategi ini berguna juga untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih.

Tabel 2.1

Misi dan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih
Tahun 2013 – 2018

No	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman.	Meningkatkan penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana kebinamargaan.	Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana kebinamargaan
3.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pemantapan data base dan pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan yang terpadu.	Mewujudkan kualitas dokumen perencanaan, pemantapan data base dan pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan yang terpadu.
4.	Meningkatkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan peningkatan pelayanan administrasi.	Mewujudkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan peningkatan pelayanan administrasi.
5.	Mengembangkan sistem penataan ruang kota.	Mewujudkan penataan ruang yang dinamis antisipatif.

2.2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan, dimana sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan

strategis pemerintah daerah. Sasaran yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas dan memperhatikan tujuan dalam perencanaan strategis, maka sasaran sebagai koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Prabumulih dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan Pertama : Meningkatkan penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman

✚ Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan persediaan rumah yang layak dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas prasarana perumahan dan permukiman.

✚ Dengan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah pembangunan rumah jabatan
2. Jumlah pembangunan rumah dinas
3. Jumlah pembangunan gedung kantor
4. Persentase pemeliharaan rumah jabatan, rumah dinas, gedung kantor
5. Persentase Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong dalam Kondisi Baik
6. Panjang turap, talud, bronjong yang terbangun
7. Panjang pengelolaan jaringan irigasi
8. Jumlah pembangunan prasarana air minum
9. Jumlah pembangunan prasarana air limbah

Tujuan Kedua : Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana kebinamargaan


✚ Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya persediaan prasarana kebinamargaan.
2. Meningkatkan persediaan dan kualitas sarana kebinamargaan.

 Dengan indikator sebagai berikut:

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
2. Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
3. Jumlah jalan inspeksi
4. Persentase tertanganinya masalah banjir
5. Tersedianya system informasi jalan dan jembatan

Tujuan Ketiga : Mewujudkan kualitas dokumen perencanaan, pemantapan data base dan pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan yang terpadu.


 Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas produk – produk perencanaan.
2. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan.

 Dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan
3. Persentase akurasi dan ketersediaan data
4. Persentase capaian kinerja, monitoring dan evaluasi

Tujuan Keempat : Mewujudkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan peningkatan pelayanan administrasi.

 Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.
2. Terciptanya sistem kelembagaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.



Dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi
2. Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan
3. Persentase aparatur yang kompeten dalam perencanaan pembangunan
4. Persentase disiplin aparatur
5. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor
6. Persentase penataan system administrasi perkantoran
7. Persentase dokumen laporan keuangan

Tujuan Kelima : Mewujudkan penataan ruang yang dinamis antisipatif.



Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan pemanfaatan penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut dengan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Dokumen Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Rencana Rinci Tata Ruang.



Dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase system informasi perencanaan tata ruang
2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW
3. Jumlah masyarakat yang dilayani dalam pengurusan izin mendirikan bangunan

2.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

2.3.1. Strategi

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Tabel 2.2

Tujuan dan Strategi Renstra
Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2013 -2018

No.	Tujuan	Strategi
1	MISI PERTAMA Meningkatkan penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan permukiman. 2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan prasarana pemeliharaan lingkungan 3. Peningkatan penyediaan dan pelayanan prasarana air bersih 4. Peningkatan penyediaan dan pelayanan prasarana drainase.
2	MISI KEDUA Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana kebinamargaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur sentra industri/perdagangan yang menunjang peningkatan aksesibilitas kendaraan maupun pedestrian yang menunjang perkuatan citra

		<p>kawasan</p> <p>2. Pengembangan infrastruktur kawasan yang aksesibel khususnya di bidang kebinamargaan</p>
3	<p>MISI KETIGA</p> <p>Mewujudkan kualitas dokumen perencanaan, pemantapan data base dan pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan yang terpadu.</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi perencanaan</p> <p>2. Meningkatkan proses monitoring, pengendalian dan evaluasi dalam rangka efektivitas kinerja</p> <p>3. Meningkatkan penyediaan data base yang akurat</p>
4	<p>MISI KEEMPAT</p> <p>Mewujudkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan peningkatan pelayanan administrasi.</p>	<p>1. Meningkatkan jumlah SDM pelayanan administrasi dan keuangan</p> <p>2. Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan DPU</p> <p>3. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan</p>
5	<p>MISI KELIMA</p> <p>Mewujudkan penataan ruang yang dinamis antisipatif.</p>	<p>1. Penyusunan pembagian kawasan wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan perizinan mendirikan bangunan bagi masyarakat</p> <p>3. Pengembangan Street furniture yang menunjang keindahan kota dan meningkatkan kenyamanan para pengguna</p>

2.3.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini

table 4.3 menampilkan kebijakan – kebijakan yang diambil dengan strategi – strategi yang ditetapkan.

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2013 -2018

No	Strategi	Arah Kebijakan
1.	MISI PERTAMA	
	1. Peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penataan ruang kawasan, perumahan dan pemukiman melalui pembinaan dan pemberdayaan komunitas kawasan/perumahan. - Meningkatkan Kuantitas dan kualitas jalan lingkungan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan SDM.
	2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan prasarana pemeliharaan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan inventarisasi dan pengelolaan bangunan gedung kantor dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. - Meningkatkan mutu pelayanan, partisipasi dan transparansi melalui peningkatan akses dan sebaran informasi pembangunan sarana dan prasarana.
	3. Peningkatan penyediaan dan pelayanan prasarana air bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan kepada publik melalui peningkatan kinerja dan pengelolaan terhadap air minum dan air limbah. - Meningkatkan sarana prasarana dan ketersediaan serta manajemen air baku untuk air

		minum.
	4. Peningkatan penyediaan dan pelayanan prasarana drainase.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan kepada publik melalui peningkatan kinerja dan pengelolaan terhadap persampahan, drainase. - Meningkatkan sarana prasarana dan ketersediaan serta manajemen air limbah
2.	<p>MISI KEDUA</p> <p>1. Pengembangan infrastruktur sentra industri/perdagangan yang menunjang peningkatan aksesibilitas kendaraan maupun pedestrian yang menunjang perkuatan citra kawasan</p> <p>2. Pengembangan infrastruktur kawasan yang aksesibel khususnya di bidang kebinamargaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengawasan infrastruktur dan layanan terhadap tanggap darurat dan bencana alam. - Meningkatkan perlengkapan perbekalan dan peralatan sarana dan prasarana wilayah serta pengembangan dan pembangunan infrastruktur perdesaan/kelurahan. - Meningkatkan aksesibilitas dalam kota, jalan poros serta perlengkapan sarana dan prasaran jembatan
	<p>MISI KETIGA</p> <p>1. Meningkatkan koordinasi perencanaan</p> <p>2. Meningkatkan proses monitoring, pengendalian dan evaluasi dalam rangka efektivitas kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kerjasama di segala bidang dalam penyusunan perencanaan - Melakukan rapat - rapat koordinasi tentang perencanaan - Membuat laporan progress kegiatan dan capaian kinerja keuangan

	3. Meningkatkan penyediaan data base yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan proses pengendalian, evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan - Melakukan inventarisasi data pembangunan di segala bidang - Melakukan pengawasan secara kontinu terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
4.	<p>MISI KEEMPAT</p> <p>1. Meningkatkan jumlah SDM pelayanan administrasi dan keuangan</p> <p>2. Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan DPU</p> <p>3. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. - Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan - Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumberdaya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi. - Menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana - Menyediakan sistem administrasi perkantoran - Membina disiplin aparatur - Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
5.	<p>MISI KELIMA</p> <p>1. Penyusunan pembagian kawasan wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan perizinan mendirikan bangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang - Menyediakan peraturan terkait pelayanan perizinan

	bagi masyarakat	mendirikan bangunan
3.	Pengembangan Street furniture yang menunjang keindahan kota dan meningkatkan kenyamanan para pengguna	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pengendalian tata ruang kota melalui perizinan - Menyediakan standar harga bangunan - Mengarahkan pembangunan dan pengembangan street furniture sesuai dengan rencana pengembangan kota

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

Dalam Tahun Anggaran 2013 – 2018 Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan kegiatan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan sumber dana yang sangat terbatas, seperti dana APBD Kota, Dana Bantuan Kabupaten dan Provinsi serta masih diupayakan sumber dana dari bantuan Pemerintah Pusat melalui dana Bantuan Luar Negeri.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bertujuan untuk Mewujudkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan Peningkatan Pelayanan Administrasi antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja serta Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Sosialisasi Kemasyarakatan dan Perjalanan Kedinasan.

Indikator keberhasilan program ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2016 dengan target pencapaian 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bertujuan untuk Meningkatkan penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan pemukiman antara lain penyediaan gedung-gedung sebagai sarana dan fasilitas daerah.

Indikator keberhasilan program ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2016 dengan target pencapaian 100 %.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Bertujuan untuk Mewujudkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan Peningkatan Pelayanan Administrasi antara lain dengan adanya penyediaan fasilitas pakaian khusus untuk hari-hari tertentu untuk para pegawai Dinas Pekerjaan Umum.

Indikator keberhasilan program ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2016 dengan target pencapaian 100 %

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bertujuan untuk Mewujudkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan Peningkatan Pelayanan Administrasi antara lain dengan dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Formal para pegawai Dinas Pekerjaan Umum.

Indikator keberhasilan program ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2016 dengan target pencapaian 100 %

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Bertujuan untuk Mewujudkan kualitas dokumen perencanaan, pemantapan data base dan pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan yang terpadu di lingkup Dinas Pekerjaan Umum antara lain terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun, penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum.

Indikator keberhasilan program ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2016 dengan target pencapaian 100 %

6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bertujuan untuk Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana kebinamargaan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan sarana dan prasarana Jalan dan Jembatan untuk mewujudkan lancar berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan.

Indikator keberhasilan program ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2016 dengan target pencapaian 40 km.

7. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong

Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sumber daya air melalui peran serta masyarakat untuk memelihara saluran dan prasarana drainase berfungsi dengan baik.

Indikator keberhasilan program ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2016 dengan target pencapaian 2 km.

8. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Memelihara kualitas dan kuantitas serta pemerataan sarana dan prasarana Jalan dan Jembatan untuk mewujudkan lancar berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan.

Indikator keberhasilan program ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2016 dengan target pencapaian 120 km.

9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Program ini bertujuan agar Panjang pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik.

Indikator keberhasilan program ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2016 dengan target pencapaian 20 km.

10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program ini bertujuan agar Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih dengan menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sumber daya air

minum melalui peran serta pemerintah dengan dibangunnya Sumur Bor sebagai Sumber Air Baku bagi masyarakat.

Indikator keberhasilan program ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2016 dengan target pencapaian 30 Unit.

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program ini bertujuan agar Tersedianya Prasarana Umum Air Minum dan Air Limbah dengan Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sumber daya air melalui peran serta masyarakat untuk memelihara saluran air limbah.

Indikator keberhasilan program ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2016 dengan target pencapaian 17 Unit.

12. Program Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong – Gorong

Memelihara kualitas dan kuantitas serta pemerataan prasarana dan sarana sumber daya air melalui peran serta masyarakat untuk memelihara saluran dan prasarana drainase berfungsi dengan baik.

Indikator keberhasilan program ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2016 dengan target pencapaian 1 Unit.

2.5. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintah serta merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Rencana kinerja merupakan perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan

serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap sesuai dengan prioritas.

Rencana kinerja ini merupakan proses yang periodik tahunan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam bidang ekonomi, maupun sosial budaya maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan dimasa-masa mendatang.

Rencana kinerja ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengetahui apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dengan realisasi.

Sasaran strategis tahun 2016 ditetapkan sebanyak 7 (Tujuh) sasaran dengan target indikator sebanyak 46 (tiga puluh dua) indikator, secara rinci dapat dilihat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada **lampiran 1**.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kegiatan yang ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok :

- a. Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
- b. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih pada tahun 2016 mempunyai 46 (Empat puluh enam) Target Indikator Kinerja, secara rinci dapat dilihat dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2016 pada **lampiran 2**.

2.6. PENETAPAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah.

Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2016 yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan, sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2016 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2016. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2016, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2016 telah ditetapkan dan disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan sehingga secara Substansial Penetapan Kinerja Tahun 2016 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2016. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2016 selengkapnya terdapat pada **lampiran 3**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2016, mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/618/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (*Performance plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*Performance result*). Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Celah Kinerja (*performance gap*) yang terjadi tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja dan digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi dan capaian tahun ini dengan realisasi dan capaian tahun lalu, serta realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode Renstra.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- **85 s.d. 100 = Baik Sekali**
- **70 s.d. <85 = Baik**
- **55 s.d. <70 = Cukup**
- **< 55 = Kurang**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

Indikator Kinerja Sasaran


Indikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2. Evaluasi Analisis Kinerja Kegiatan dan Pencapaian sasaran

Dinas Pekerjaan Umum telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk Tahun 2016 telah dilaksanakan seluruhnya, namun tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudkan secara optimal. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Tujuan 1 adalah** Meningkatkan penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman


Untuk mewujudkan tujuan 1 telah ditetapkan 2 sasaran strategis, dengan dilaksanakan upaya pencapaian yang dijelaskan di bawah ini :

-  **Sasaran Tujuan 1 yang Pertama** adalah Meningkatkan persediaan rumah yang layak dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Indikator keberhasilan sasaran ini beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1.1

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN			
		TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor, Balai, Gedung Serbaguna, GOR di wilayah Kota Prabumulih	Unit	10	10	100
2	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	Unit	1	1	100
3	Persentase Tanah untuk Perumahan PNS	%	100	100	100
4	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	%	100	99,81	99,81
5	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Unit	6	2	33,33
6	Persentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	%	100	95,22	95,22
7	Landclearing Lahan Perkantoran	%	100	0	0
8	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah di wilayah Kota Prabumulih	Unit	35	35	100
9	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Ibadah	Unit	40	40	100
10	Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Unit	9	9	100
11	Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Unit	3	3	100
12	Persentase Terpenuhinya Instalasi PDAM Kota Prabumulih	%	100	100	100

 **Sasaran Tujuan 1 yang Kedua** adalah Meningkatkan kualitas prasarana perumahan dan permukiman.

Indikator keberhasilan sasaran ini beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1.2

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN			
		TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong					
1	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Km	2	10,9475	547,375
Program Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong					
1	Terlaksananya Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Unit	1	1	100
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					
1	Panjang Normalisasi Saluran Sungai	Km	20	2,250	11,25
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku					
1	Jumlah Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah	Unit	30	4	13,33
2	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	Unit	7	18	257,14
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					
1	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah	Unit	8	2	25
2	Persentase Dana Operasional Administrasi Sanitasi Masyarakat (SANIMAS)	%	100	100	100

2. Tujuan 2 adalah Meningkatkan Penyediaan Prasarana dan sarana kebinamargaan.


Untuk mewujudkan tujuan 2 telah ditetapkan 2 sasaran strategis, dengan dilaksanakan upaya pencapaian yang dijelaskan di bawah ini :

 **Sasaran Tujuan 2 yang pertama** adalah Meningkatkan persediaan prasarana kebinamargaan.

Indikator keberhasilan sasaran ini beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 2.1

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN			
		TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan					
1	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Km	40	39.108,7	977.719,25
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
1	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Km	40	1.204,16	3.010,4
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
1	Terlaksananya Jalan di Prabumulih yang terehabilitasi	Km	115	14,911	12,966

 **Sasaran Tujuan 2 yang kedua** adalah Meningkatkan persediaan dan kualitas sarana kebinamargaan.


Indikator keberhasilan sasaran ini beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 2.2

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN			
		TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan					
1	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Bina Marga	%	100	96,54	96,54

3. **Tujuan 3** adalah Mewujudkan Kualitas Dokumen Perencanaan, pemantapan data base dan pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan yang terpadu.


Untuk mewujudkan tujuan 3 telah ditetapkan 1 sasaran strategis, dengan dilaksanakan upaya pencapaian yang dijelaskan di bawah ini :

 **Sasaran Tujuan 3 yang pertama** adalah Meningkatnya kualitas produk-produk perencanaan.

Indikator keberhasilan sasaran ini beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN			
		TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dok	1	1	100
2	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Dok	1	1	100
3	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dok	1	1	100
4	Jumlah Laporan LAKIP Dinas PU	Dok	1	1	100
5	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimal	Dok	1	1	100
6	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur	Dok	1	1	100
7	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Perubahan	Dok	1	1	100

 **Sasaran Tujuan 3 yang kedua** adalah Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan.


Indikator keberhasilan sasaran ini beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN			
		TAHUN 2016			
		SATU AN	TAR GET	REALI SASI	%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
1	Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan	Dok	1	0	0


4. Tujuan 4 adalah Mewujudkan kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan Peningkatan pelayanan administrasi.

Untuk mewujudkan tujuan 4 telah ditetapkan 2 sasaran strategis, dengan dilaksanakan upaya pencapaian yang dijelaskan di bawah ini :

 **Sasaran Tujuan 4 yang pertama** adalah Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten. Indikator keberhasilan sasaran ini beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4.1

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN			
		TAHUN 2016			
		SATU AN	TAR GET	REALI SASI	%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Dinas Pekerjaan Umum	Kegiatan	1	1	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	100	0	0

 **Sasaran Tujuan 4 yang kedua** adalah Terciptanya sistem kelembagaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel

Indikator keberhasilan sasaran ini beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4.2

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN			
		TAHUN 2016			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat (prangko, materai, dan benda pos lainnya)	Bulan	12	12	100
2	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100
3	Persentase Penyediaan Kendaraan Dinas yang Layak Pakai dan Jasa STNK Kendaraan Dinas	%	100	60,49	60,49
4	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dalam kelancaran tugas-tugas Dinas PU	%	100	11,84	11.84
5	Persentase Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Service Komputer dan Lainnya)	Bulan	12	12	100
6	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk mendukung kegiatan DPU	Bulan	12	12	100
7	Persentase Penyediaan Dana Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100
8	Persentase Penyediaan Alat-alat Listrik untuk Penerangan dan Jaringan Listrik	Bulan	12	12	100
9	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan untuk mendukung Kelancaran Tugas DPU)	Bulan	12	12	100
10	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat. Logistik dan Tamu	Bulan	12	12	100
11	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12	12	100
12	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Bulan	12	12	100
13	Persentase Belanja Media Informasi (Koran, Majalah, Buku dll) dan Iklan	%	100	100	100


Secara umum capaian indikator kinerja diatas telah dapat tercapai dengan baik, walaupun belum secara keseluruhan indikator kinerja tersebut dapat terealisasi 100 %, sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun capaian indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Indikator Landclearing Lahan Perkantoran yang tidak terealisasi sama sekali dikarenakan Akibat Adanya Defisit Anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga Pelaksanaan Belanja Modal dibatalkan.
2. Indikator Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur tidak terealisasi sama sekali dikarenakan Kegiatan Undangan Pendidikan dan Pelatihan Formal tidak mencukupi waktu lagi yang sudah berada di Akhir Anggaran.
3. Indikator Jumlah Dokumen Data Base Jalan dan Jembatan yang tidak terealisasi sama sekali dikarenakan adanya Pembatalan Anggaran sehingga Tender Lelang tidak terlaksana.


3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015

Adapun perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8.
Perbandingan Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1


INDIKATOR KINERJA		SATUAN	CAPAIAN 2016 (%)	CAPAIAN 2015 (%)	KET
 TUJUAN 1 (SASARAN YANG PERTAMA)					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor, Balai, Gedung Serbaguna, GOR di wilayah Kota Prabumulih	Unit	100	96,67	Naik
2	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	Unit	100	100	Tetap
3	Persentase Tanah untuk Perumahan PNS	%	100	-	Naik


4	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	%	99,81	99,96	Naik
5	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Unit	33,33	100	Turun
6	Persentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	%	95,22	59	Naik
7	Landclearing Lahan Perkantoran	%	0	-	Naik
8	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah di wilayah Kota Prabumulih	Unit	100	100	Tetap
9	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Ibadah	Unit	100	100	Tetap
10	Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Unit	100	-	Naik
11	Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Unit	100	-	Naik
12	Persentase Terpenuhinya Instalasi PDAM Kota Prabumulih	%	100	-	Naik
 TUJUAN 2 (SASARAN YANG KEDUA)					
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong					
1	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Km	547,37	2.034,35	Turun
Program Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong					
1	Terlaksananya Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Unit	100	-	Naik
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					
1	Panjang Normalisasi Saluran Sungai	Km	11,25	-	Naik
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku					
1	Jumlah Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah	Unit	13,33	33,33	Turun
2	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	Unit	257,14	33,33	Naik
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					
1	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah	Unit	25	87,50	Turun
2	Persentase Dana Operasional Administrasi Sanitasi Masyarakat (SANIMAS)	%	100	100	Tetap


 Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari tujuan Pertama di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada umumnya mengalami Kenaikan, hal ini disebabkan pada tahun 2016 pada Peningkatan Pembangunan di Kota Prabumulih di Bidang Umum seperti Pembangunan maupun Rehabilitasi Gedung Kantor serta Adanya Penambahan Indikator Pembangunan Rumah Ibadah dan Sarana – Prasarana Fasilitas Umum di Kota Prabumulih yang sebelumnya tidak diprogramkan pada tahun 2015.
2. Pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong ini, pada Tahun 2016 mengalami Penurunan, Hal ini disebabkan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang sudah banyak terlaksana Pembangunan di Tahun 2015, sehingga pencegahan terjadinya banjir jika Musim Penghujan tiba sudah dapat teratasi.
3. Untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan Adanya Bantuan Dana dari Pemerintah Provinsi untuk Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai yang sangat membantu Masyarakat Kota Prabumulih dalam hal Pendangkalan Sungai.
4. Jumlah Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah dan Jumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah, persentasenya mengalami penurunan cukup besar. Hal ini disebabkan karena Kota Prabumulih telah giat melaksanakan pembangunan dalam sarana air bersih pada tahun 2015 yang lalu.

Tabel 3.9.
Perbandingan Analisis Capaian Kinerja Tujuan 2

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	CAPAIAN 2016 (%)	CAPAIAN 2015 (%)	KET
 TUJUAN 2 (SASARAN YANG PERTAMA)					
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan					
	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Km	977.719,25	-	Naik


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Km	3.010,4	4,4	Naik
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
	Terlaksananya Jalan di Prabumulih yang terehabilitasi	Km	12,966	0,928	Naik
 TUJUAN 2 (SASARAN YANG KEDUA)					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan					
	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Bina Marga	%	96,54	-	Naik


 Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari tujuan Kedua di atas dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Program Rehab Jalan dan Jembatan, mengalami Kenaikan dari Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena Adanya Bantuan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat yang cukup besar untuk Program Pembangunan Jalan sehingga Pembangunan Jalan di Kota Prabumulih semakin baik .
2. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, persentasenya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, Hal ini disebabkan karena Perlunya Peralatan dan perlengkapan Bina Marga untuk membantu kegiatan Kantor Dinas Pekerjaan Umum di Lapangan.

Tabel 3.10.

Perbandingan Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2015	KET
 TUJUAN 3 (SASARAN YANG PERTAMA)					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dok	100	100	Tetap
2	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Dok	100	100	Tetap
3	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dok	100	100	Tetap


4	Jumlah Laporan LAKIP Dinas PU	Dok	100	-	Naik
5	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimal	Dok	100	-	Naik
6	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur	Dok	100	-	Naik
7	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Perubahan	Dok	100	-	Naik
 TUJUAN 3 (SASARAN YANG KEDUA)					
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
1	Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan	Dok	0	-	Tetap


 Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari tujuan Ketiga di atas dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mengalami kenaikan, hal ini disebabkan Jumlah Dokumen yang diperlukan dalam Pemerintahan telah terselesaikan dengan baik dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun-tahun sebelumnya Dokumen yang diperlukan di Pemerintahan seperti Dokumen SOP, dan Dokumen SPM belum tersedia sama sekali di Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih.
2. Sementara untuk Program Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk indikator tersedianya Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan sama seperti tahun 2015 yaitu belum terlaksana kembali dikarenakan adanya Defisit Anggaran sehingga Proses Lelang untuk kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 3.11.

Perbandingan Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2016 (%)	CAPAIAN 2015 (%)	KET
 TUJUAN 4 (SASARAN YANG PERTAMA).				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				

	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Dinas Pekerjaan Umum	Kegiatan	100	100	Tetap
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	0	99	Turun
 TUJUAN 4 (SASARAN YANG KEDUA).					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat (prangko, materai, dan benda pos lainnya)	Bulan	100	100	Tetap
2	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	100	0	Naik
3	Persentase Penyediaan Kendaraan Dinas yang Layak Pakai dan Jasa STNK Kendaraan Dinas	%	60,49	66,65	Turun
4	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dalam kelancaran tugas-tugas Dinas PU	%	11,84	68,97	Turun
5	Persentase Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Service Komputer dan Lainnya)	Bulan	100	100	Tetap
6	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk mendukung kegiatan DPU	Bulan	100	100	Tetap
7	Persentase Penyediaan Dana Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	100	100	Tetap
8	Persentase Penyediaan Alat-alat Listrik untuk Penerangan dan Jaringan Listrik	Bulan	100	100	Tetap
9	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan untuk mendukung Kelancaran Tugas DPU)	Bulan	100	100	Tetap
10	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat. Logistik dan Tamu	Bulan	100	100	Tetap
11	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	100	100	Tetap
12	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Bulan	100	100	Tetap
13	Persentase Belanja Media Informasi (Koran, Majalah, Buku dll) dan Iklan	%	100	100	Tetap

 Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari tujuan Keempat di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur, capaian rata-rata sasaran ini telah mencapai 100 % dengan capaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan.

2. Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mengalami penurunan dikarenakan Kegiatan Undangan Pendidikan dan Pelatihan Formal tidak mencukupi waktu lagi yang sudah berada di Akhir Anggaran.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, capaian rata-rata mencapai 100 % dengan realisasi dana yang telah mencapai sasaran pada Tahun 2016.

3.4. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2016

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2016 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar **Rp. 294.892.796.255,00** dengan Realisasi pelaksanaan anggaran **Program** sampai dengan Desember 2016 adalah sebesar **Rp. 208.075.959.563,00** dan Realisasi Anggaran untuk **Non Program** sebesar **Rp. 5.613.885.062,00**. Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2016 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Akuntabilitas Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN DANA	
				REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1. Terciptanya sistem kelembagaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabilitas	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.175.620.000,00	1.408.228.985,00	64,73
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000,00	99.996.000,00	100,00
	2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	271.420.000,00	237.085.400,00	87,35
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	149.998.900	100,00
	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.153.415,00	95,77

	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000,00	57.783.000,00	96,31
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	200.200.000,00	200.190.398,00	100,00
	7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	790.000.000,00	462.962.741,00	58,60
	8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	35.000.000,00	4.775.000,00	13,64
	9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	26.007.501,00	86,69
	10	Penyediaan Jasa Media Informasi	70.000.000,00	69.992.630,00	99,99
	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	12	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	418.000.000,00	49.484.000,00	11,84
	13	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20
2. Meningkatkan Persediaan Rumah yang layak dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat	II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63.012.711.000,00	30.850.746.389,00	Error! Not a valid link.
	1	Pengadaan Tanah	3.650.000.000,00	1.006.973.500,00	27,59
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85.000.000,00	84.839.549,00	99,81
	3	Pembangunan Gedung Kantor	6.376.720.000,00	3.414.265.480,00	53,54
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2.600.000.000,00	1.335.994.970,00	51,38
	5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	220.000.000,00	209.397.000,00	95,18
	6	Persiapan Lahan Bangunan	0,00	-	0,00
	7	Pembangunan Rumah Ibadah	9.689.471.000,00	5.187.387.010,00	53,54
	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Ibadah	7.121.520.000,00	4.555.037.100,00	63,96
	9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	26.650.000.000,00	11.336.203.150,00	42,54
	10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	325.000.000,00	288.735.000,00	88,84
	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	4.295.000.000,00	1.729.751.750,00	40,27

	12	Pengadaan Instalasi PDAM Kota Prabumulih	2.000.000.000,00	1.702.161.880,00	85,11
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten	III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000,00	99.780.000,00	99,78
	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	100.000.000,00	99.780.000,00	99,78
	IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.000.000,00	-	0,00
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	85.000.000,00		0,00
4. Meningkatnya Kualitas Produk-produk Perencanaan	V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	236.000.000,00	189.713.000,00	80,3869
	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000,00	20.750.000,00	69,17
	2	Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai	27.000.000,00	17.733.000,00	65,68
	3	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	27.000.000,00	17.745.000,00	65,72
	4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	27.000.000,00	17.738.000,00	65,70
	5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	30.000.000,00	29.997.000,00	99,99
	6	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	75.000.000,00	65.750.000,00	87,67
	7	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	VI.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	261.936.000,00	65.884.000,00	25,15
	1	Penyusunan Data Base Jalan dan Jembatan	261.936.000,00	65.884.000,00	25,15
5. Meningkatnya Persediaan Prasarana Kebinamargaan	VII.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	112.565.458.300,00	104.281.319.598,00	92,6406
	1	Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Timur	23.265.723.000,00	17.037.283.680,00	73,23
	2	Peningkatan Jalan (Paket 3) DAK	11.674.004.850,00	11.541.330.336,00	98,86
	3	Peningkatan Jalan (Paket 4) DAK	15.617.835.232,00	15.313.689.800,00	98,05
	4	Supervisi Peningkatan Jalan (Paket 1) DAK	13.491.450.450,00	13.320.019.100,00	98,73
	5	Supervisi Peningkatan Jalan (Paket 2) DAK	12.135.836.410,00	11.987.448.500,00	98,78

	6	Supervisi Peningkatan Jalan (Paket 3) DAK	9.886.733.440,00	9.696.009.394,00	98,07
	7	Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan	335.000.000,00	172.332.230,00	51,44
	8	Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Utara	595.392.000,00	185.057.700,00	31,08
	9	Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah	491.730.000,00	253.141.420,00	51,48
	10	Peningkatan Jalan (Paket 1) DAK	12.964.215.600,00	12.805.172.149,00	98,77
	11	Peningkatan Jalan (Paket 2) DAK	12.107.537.318,00	11.969.835.289,00	98,86
	VIII.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	85.699.995.000,00	56.175.474.691,00	65,5490
	1	Pembangunan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Utara	4.826.606.000,00	2.701.303.810,00	55,97
	2	Pembangunan Jalan Wilayah Kecamatan Cambai	7.126.471.000,00	4.904.810.150,00	68,83
	3	Pembangunan Jalan Wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah	13.172.063.000,00	8.434.735.420,00	64,04
	4	Pembangunan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Timur	23.109.433.000,00	13.385.581.820,00	57,92
	5	Pembangunan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Barat	28.011.957.000,00	20.400.660.610,00	72,83
	6	Pembangunan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan	9.453.465.000,00	6.348.382.881,00	67,15
	IX.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	848.908.000,00	844.621.300,00	99,50
	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah	2.071.165.000,00	1.055.888.640,00	50,98
	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Timur	394.940.000,00	122.948.800,00	31,13
	3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Barat	1.260.050.000,00	678.427.880,00	53,84
	4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Utara	1.787.429.000,00	1.425.118.900,00	79,73
	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Cambai	60.000.000,00	-	0,00
	X.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	7.342.460.000,00	5.000.602.420,00	68,1053
	1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah	1.487.776.000,00	906.609.920,00	60,94
6.	Meningkatnya Kualitas Prasarana Perumahan dan Permukiman				

2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Kecamatan Prabumulih Timur	2.990.549.000,00	2.395.766.130,00	80,11
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Kecamatan Prabumulih Barat	948.980.000,00	748.969.560,00	78,92
4	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan	985.500.000,00	411.365.400,00	41,74
5	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Kecamatan Prabumulih Utara	509.175.000,00	338.448.410,00	66,47
6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Kecamatan Cambai	420.480.000,00	199.443.000,00	47,43
XI.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Program Lainnya	6.194.250.000,00	3.256.705.810,00	52,58
1	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	6.194.250.000,00	3.256.705.810,00	52,58
XII.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	5.023.332.200	2.987.147.000,00	59,47
1	Pembangunan Sumur Air Tanah Wilayah Kecamatan Prabumulih Barat	100.000.000,00	98.925.000,00	98,93
2	Pembangunan Sumur Bor Wilayah Kecamatan Prabumulih Timur	300.000.000,00	294.750.000,00	98,25
3	Pembangunan Sumur Bor Wilayah Kecamatan Prabumulih Barat	200.000.000,00	196.800.000,00	98,40
4	Pembangunan Sumur Bor Wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5	Pembangunan Sumur Bor Wilayah Kecamatan Cambai	200.000.000,00	196.860.000,00	98,43
6	Pembangunan Sumur Bor, Sanitasi IPAL dan MCK + (DAK)	2.619.752.200,00	2.199.812.000,00	83,97
7	Pembangunan Sambungan Rumah (SR) PDAM Lanjutan	1.603.580.000,00	1.539.268.000,00	95,99
XIII.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	404.830.000,00	257.599.450,00	63,6315
1	Pembangunan SPAL (DAK)	154.830.000,00	12.300.000,00	7,94
2	Sanitasi Masyarakat (SANIMAS)	100.000.000,00	96.299.450,00	96,30
3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	150.000.000,00	149.000.000,00	99,33
XIV.	Program Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong	90.000.000,00	62.174.000,00	69,08

	1	Program Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong Wilayah Kecamatan Prabumulih Barat	90.000.000,00	62.174.000,00	69,08
7. Meningkatnya Persediaan Prasarana Kebinamargaan	XV.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	163.875.000,00	158.200.000,00	96,54
	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bina Marga	163.875.000,00	158.200.000,00	96,54
Sub Total Program			288.929.051.500,00	208.075.959.563,00	72,02
Non Program			5.963.744.755,00	5.613.885.062,00	94,13
Total			294.892.796.255,00	213.689.844.625,00	72,46

Sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran-sasaran mencapai 100 % dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran.

3.5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2015 mendapat nilai 55,36 atau dengan predikat “CC (Cukup/Memadai)”. Rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih beserta seluruh jajarannya yang telah ditindaklanjuti pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih telah memperhatikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.
- Memanfaatkan IKU sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja.
- Penyajian informasi kinerja pada Lakip telah menjelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja serta telah melakukan perbandingan data kinerja.

- d. Setelah mengikuti beberapa pelatihan tentang penyajian Lakip yang sistematis dan benar, sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih dapat memperbaiki lagi dalam menyajikan informasi Lakip yang lebih baik yang sesuai dengan Renstra 2013-2018.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menindaklanjuti INPRES Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi Laporan Akuntabilitas Bappeda yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian Program Strategis yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013-2018. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumberdaya manusia yang memadai. Selain ini diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas, Badan, Instansi di jajaran Pemerintah Kota Prabumulih dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 4 tujuan dari 7 sasaran yang didukung 46 indikator kinerja sasaran, pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan di atas 100% sebanyak 5 indikator atau 10,87 % dari jumlah indikator kinerja sasaran.
2. Keberhasilan 50% sampai dengan 100% sebanyak 32 indikator atau 69,57% dari jumlah indikator kinerja sasaran.
3. Capaian di bawah 50% sebanyak 6 indikator atau 13,04% dari jumlah indikator kinerja sasaran.
4. Sejumlah 3 indikator capaian belum terealisasi atau 6,52% dari jumlah indikator kinerja sasaran, karena belum didukung oleh program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut.

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dengan isi-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan

strategi dan arah kebijakan pembangunan. Salah satu model sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan adalah dengan menggunakan model analisis SWOT (*Strenghts, Weakneses, Opportunities dan Theats*). Analisis ini secara sederhana membantu dalam mengidentifikasi variable internal dan eksternal, yang dimiliki oleh suatu entitas/organisasi dalam menyikapi perubahan dinamika lingkungan eksternal (*Peluang dan Tantangan*) dikombinasikan dengan sumberdaya internal organisasi (*Kekuatan dan Kelemahan*). Pada sisi yang lain Analisis SWOT dapat memberikan dasar bagi pelaksanaan misi SKPD Periode 2013 – 2018. Indentifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (*Strenghts*) :

- Adanya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dalam Wilayah Kota Prabumulih.
- Struktur Organisasi yang jelas
- Tersedianya sumberdaya manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.
- Kemampuan Perencana infrastruktur yang handal.

Kelemahan(*Weaknesses*) :

- Prasarana dan sarana yang belum memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.
- Belum semua kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum didukung oleh teamwork yang terpadu.
- Belum optimalnya sumberdaya manusia yang ada.
- Dana penanganan dan pembangunan infrastruktur yang terbatas

Peluang (*Opportunities*) :

- Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan Investor baik dalam maupun luar negeri.
- Adanya kerjasama antar instansi.
- Terjadinya kerjasama antara dalam negeri dan luar negeri, terutama dalam pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan Diklat/Kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi.
- Pemanfaatan Teknologi informasi

Ancaman(Threats) :

- Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan
- Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses perencanaan
- Sering berubahnya peraturan perundang-undangan

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternative strategi dengan menetapkan faktor-faktor tersebut ke dalam matrik SWOT. Melalui Tabel 8 identifikasi analisa faktor lingkungan internal dan eksternal berikut ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

- ✓ Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya
- ✓ Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman
- ✓ Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada
- ✓ Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Tabel 4.1
Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal
Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih

ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL			
No	KEKUATAN (S)	No	KELEMAHAN (W)
S1	Adanya Perda tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)	W1	Prasarana dan sarana yang belum memadai
S2	Struktur Organisasi yang Jelas	W2	Teamwork yang belum terpadu
S3	Tersedianya sumberdaya manusia yang relatif proporsional	W3	Belum optimalnya sumberdaya manusia yang ada
S4	Kemampuan Perencana infrastruktur yang handal.	W4	Dana penanganan dan pembangunan infrastruktur yang terbatas
ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL			
No	PELUANG (O)	No	ANCAMAN (T)
O1	Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Propinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan Investor baik dalam maupun luar negeri Apresiasi masyarakat terhadap perencanaan cukup tinggi	T1	Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan
O2	Kerjasama antar instansi dan antar daerah	T2	Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses perencanaan
O3	Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan perencanaan dari lembaga terkait	T3	Sering berubahnya peraturan perundang-undangan
O4	Pemanfaatan teknologi informasi		

A. Analisis Faktor Internal

Analisis faktor lingkungan internal meliputi :

- a. Kekuatan
- b. Kelemahan

Kekuatan

1. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Tupoksi)

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dalam Wilayah Kota Prabumulih.

2. Struktur Organisasi Yang Jelas

Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu SKPD yang terdapat pada Pemerintah Kota Prabumulih telah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.

3. Tersedianya sumberdaya manusia yang relatif proporsional

Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih mempunyai sumberdaya manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum

4. Kemampuan Perencana infrastruktur yang handal

Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih didukung oleh aparatur perencana infrastruktur yang handal dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan perencanaan infrastruktur.

Kelemahan

1. Belum optimalnya sumberdaya manusia yang ada

Meskipun memiliki aparatur perencana infrastruktur yang handal namun kuantitas pegawai di lingkup Dinas Pekerjaan Umum saat ini masih kurang. Rata-rata perbidang hanya memiliki 9 orang staf. Hal ini sangat menyulitkan mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan.

2. Sarana dan Prasarana Belum Memadai

Sarana dan prasarana pada Dinas Perencanaan Umum Kota Prabumulih masih belum optimal dalam mendukung kelancaran penyelesaian

kegiatan. Ruangan kerja juga kurang memadai dalam menampung jumlah pegawai yang cukup besar.

3. *Belum semua kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum didukung oleh teamwork yang terpadu*

Sistem koordinasi dan kerjasama teamwork yang baik untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum masih belum terpadu baik dilingkungan intern Dinas Pekerjaan Umum maupun hubungan eksternal dengan instansi terkait.

4. *Dana penanganan dan pembangunan infrastruktur yang terbatas*

Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur masih belum dapat dilakukan secara merata. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran, jumlah personil, prasarana transportasi, maupun hubungan komunikasi yang harmonis dengan instansi/stakeholders yang dituju.

B. Analisis Faktor Eksternal

Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi :

- a. Peluang
- b. Ancaman

Peluang

1. *Terjadinya kerjasama antara dalam negeri dan luar negeri, terutama dalam pengembangan sumberdaya aparatur*

Banyaknya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri melalui pendidikan formal maupun informal melalui beasiswa penuh maupun kemudahan izin belajar menjadi peluang yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk menambah wawasan pegawai.

2. *Adanya Bantuan Program/Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Propinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan Investor Baik Dalam maupun Luar negeri*

Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas sangat membutuhkan dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat, propinsi maupun investasi baik dari dalam maupun luar negeri

3. Adanya Kerjasama Antar Instansi dan Antar Daerah

Perkembangan Kota Prabumulih ke depan mengingat letak geografisnya yang sangat strategis, tentunya tidak terlepas dari hubungan kerjasama dengan daerah sekitar yang saling menguntungkan. Hal ini akan menjadi peluang yang sangat besar untuk dikembangkan demi kemajuan Kota Prabumulih

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat, menjadi peluang tersendiri untuk dapat mengoptimalkan teknologi tersebut dalam rangka mengatasi segala permasalahan daerah

Ancaman

1. Tingginya Tuntutan Peningkatan Pelayanan

Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan publik di Kota Prabumulih menjadi peluang Pemerintah Daerah untuk berupaya memenuhi tuntutan tersebut dengan melakukan beberapa peningkatan dan pengembangan pelayanan yang dilakukan pemerintah hingga ke tingkat kelurahan/desa.

2. Sering Berubahnya Peraturan Perundangan

Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dan terkadang kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lain menyebabkan Pemerintah Daerah terkadang bingung dalam menyikapi kebijakan apa yang sebaiknya diambil

3. Kebutuhan Data Yang Valid Dalam Setiap Proses Perencanaan

Data yang valid dan update menjadi urat nadi dalam membuat perencanaan yang baik, akurat, sinergi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Tabel 4.2
Matrik SWOT Dinas Pekerjaan Umum
Kota Prabumulih

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL		
<div>Analisis Lingkungan Internal</div> <div>ALI</div> <div>ALE</div> <div>Analisis Lingkungan Eksternal</div>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dalam Wilayah Kota Prabumulih. 2. Struktur Organisasi yang jelas. 3. Tersedianya sumberdaya manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum. 4. Kemampuan perencanaan infrastruktur yang handal.	1. Prasarana dan sarana yang Belum memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum. 2. Belum semua kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum didukung oleh teamwork yang terpadu. 3. Belum optimalnya sumberdaya manusia yang ada. 4. Dana penanganan dan pembangunan infrastruktur yang terbatas.
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL		
Peluang (O)	(S) + (O)	(W) + (S)
1. Adanya bantuan program /kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan Investor baik dalam maupun luar negeri	1. Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum sebagai pelaksana pembangunan sehingga terciptanya sistem kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel serta	1. Meningkatkan saranan dan prasarana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan

<p>2. Adanya kerjasama antar instansi.</p> <p>3. Terjalannya kerjasama dalam negeri dan luar negeri, terutama dalam pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca sarjana) dan Diklat/Kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi.</p> <p>4. Pemanfaatan Teknologi Informasi</p>	<p>proaktif.</p> <p>2. Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dengan menyusun produk-produk Renstra, RKT yang akan diupayakan pula agar menjadi acuan atau arahan Umum guna penyelarasan Dan penyerasian perencanaan pembangunan dengan pembangunan kota secara menyeluruh dengan mengacu pada dokumen seperti diatas.</p> <p>3. Membangun kemampuan aparatur dalam mengantisipasi era teknologi yang dapat menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum</p>	<p>2. Meningkatkan Teamwork yang terpadu dan handal guna menunjang kegiatan-kegiatan APBD dan APBN.</p> <p>3. Meningkatkan kesediaan SDA untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih</p>
Tantangan/Ancaman (T)	(S) + (T)	(W) + (T)
<p>1. Pengajuan usulan kegiatan pembanguna dari dinas/instansi belum sepenuhnya mengacu pada RPJPD Kota Prabumulih dan RPJMD Kota Prabumulih</p> <p>2. Adanya perubahan sistem anggaran yang berlaku dengan mengakibatkan terlambatnya penyusunan DPA sehingga terhambatnya pelaksanaan kegiatan.</p> <p>3. Terlambatnya Pengesahan Dokumentasi Anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat.</p>	<p>1. Menyusun kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Kota Prabumulih.</p> <p>2. Menyusun RKA dengan berbasis anggaran kinerja.</p> <p>3. Menyusun DPA dengan melibatkan tenaga yang profesional.</p>	<p>1. Meningkatkan prasarana dan sarana dengan mengacu pada RPJMD Kota Prabumulih.</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan Team work menyusun RKA berbasis anggaran kinerja.</p> <p>3. Mengoptimalkan kinerja SDA dalam menyusun RKA.</p>

Selanjutnya kami sadar bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum ini, masih dirasakan belum ada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2016 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2016, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Prabumulih, Januari 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,**

M. SUPI, ST

Nip. 19580420 198003 1 005